

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia terdiri dari 17.508 pulau, di mana antar pulau dipisahkan oleh perairan.¹ Dengan melihat kondisi geografis tersebut Indonesia memiliki penduduk yang begitu besar jumlahnya. Sebagian besar penduduk Indonesia bermukim di wilayah tepi pantai. Oleh karena itu, sebagian masyarakat Indonesia yang bermukim di sekitar pantai menggantungkan hidupnya terhadap hasil alam pesisir dan lautan. Salah satu daerah yang memiliki wilayah perairan yang cukup luas yaitu Jawa Timur.

Jawa Timur merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan laut Jawa di sebelah utara, Samudera Indonesia di sebelah selatan, Selat Bali di sebelah timur, dan Propinsi Jawa Tengah di sebelah barat. Oleh karena itu, Jawa Timur dikenal sebagai daerah yang memiliki wilayah pelabuhan hampir di seluruh Daerah Tingkat II nya, seperti pelabuhan terbesar di Jawa Timur yang berada di kota Surabaya, kemudian Gresik, Tuban, Pasuruan, Probolinggo dan Banyuwangi.² Salah satu penyumbang produksi ikan terbesar di Jawa Timur yaitu Banyuwangi. Banyuwangi terletak di ujung timur Pulau Jawa dan memiliki wilayah pantai yang potensi ikannya

¹ Supriadi dan Alimudin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.2.

² *Mimbar Jatim*, "Tingkatkan Produktivitas Ikan Melalui Program Modernisasi", edisi 12 September 1996, hlm. 18.

cukup besar. Adapun daerah padat nelayan dan penghasil ikan terdapat di daerah Muncar, terutama di desa Tembokrejo dan Kedungrejo yang berada di sebelah timur dari Kecamatan Muncar. Oleh karena itu, dinamika ekonomi masyarakatnya sangat bergantung dari hasil produksi perikanan.

Daerah Muncar yang merupakan daerah pantai, menunjukkan suasana kehidupan yang berciri khas dengan nelayan, sehingga mereka yang bekerja sebagai pedagang, pengusaha, buruh dan lainnya sebagian besar berkaitan dengan bidang nelayan. Nelayan adalah mereka yang mata pencaharian pokoknya di bidang penangkapan ikan dan penjualan ikan yang hidup di sekitar pantai. Secara geografis masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut.³ Pola hidup masyarakatnya pun sangat tergantung dari musim ikan yang berlangsung di daerah tersebut. Perlu diketahui bahwa produksi ikan erat kaitannya dengan gejala alam yang berlangsung. Ada kalanya produksi ikan melimpah, tetapi ada kalanya pula produksi ikan sangat terbatas.⁴

Kondisi masyarakat nelayan Muncar telah mengalami dinamika seiring berjalannya waktu yang disebabkan oleh modernisasi. Dimana sebelum adanya kebijakan modernisasi nelayan masih menggunakan alat tangkap ikan dengan cara tradisional. Seperti pada tahun 1960-an mekanisasi perahu mulai dilakukan dengan

³ Kusnadi, *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*, (Yogyakarta: Yogyakarta: Ar-Ruzzmedia, 2009), hlm. 27.

⁴ *Ibid.* hlm. 27.

menambahkan motor pada perahu layar, yang selanjutnya berkembang menjadi perahu motor.⁵ Kemudian pemerintah berupaya memunculkan modernisasi sekaligus pembangunan terhadap masyarakat pesisir yang didasari dengan munculnya Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang dibentuk pada masa Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto pada tahun 1969. Repelita I ditetapkan pemerintah pada periode tanggal 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974.⁶

Repelita tersebut diharapkan dapat memperbaiki terutama dibidang perikanan serta untuk menyejahterakan masyarakat nelayan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya upaya kebijakan nasional oleh pemerintah tentang motorisasi perahu dan modernisasi peralatan tangkap pada tahun 1970-an, kebijakan ini dikenal dengan istilah revolusi biru (*blue revolution*). Modernisasi perikanan atau Revolusi Biru merupakan tulang punggung untuk mendorong peningkatan produktivitas perikanan tangkap terutama di desa-desa nelayan.⁷

Revolusi Biru adalah upaya sistematis yang dibentuk pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan petani tambak di kawasan pesisir. Strategi yang ditempuh adalah dengan meningkatkan produktivitas perikanan. Secara teknis. Revolusi Biru juga diterjemahkan ke dalam mekanisasi atau motorisasi perahu dan peningkatan kualitas peralatan tangkap (modernisasi peralatan tangkap).

⁵ Masyhuri, *Menyisir Pantai Utara: Usaha Perekonomian Nelayan di Jawa dan Madura 1850-1940*, (Yogyakarta: Pustaka Nusantara dan Perwakilan KITLV, 1996), hlm. 6.

⁶ Ricklefs M.C, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005), hlm. 582.

⁷ Kusnadi, *Akar Kemiskinan Nelayan*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 20.

Modernisasi peralatan tangkap merupakan langkah substitusi terhadap peralatan tangkap tradisional yang pada masa-masa sebelumnya digunakan oleh nelayan.⁸ Selain masuknya peralatan tangkap baru pemerintah juga menyediakan fasilitas berupa pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat, yaitu Koperasi Unit Desa (KUD) Mina dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).⁹

Salah satu aspek penting adanya modernisasi bidang perikanan adalah proses bergantinya teknik produksi dari cara-cara tradisional beralih kepada cara-cara yang lebih modern. Namun, motorisasi dan modernisasi peralatan tangkap telah menimbulkan ketimpangan pendapatan di kalangan nelayan, baik nelayan tradisional maupun nelayan modern.¹⁰ Karena dalam menyikapi kebijakan modernisasi tersebut, tidak semua lapisan masyarakat nelayan dapat memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Kemudahan akses terhadap sumber daya ekonomi yang tersedia hanya dapat dicapai oleh sebagian kecil nelayan.¹¹ Seperti yang terjadi di Muncar masuknya modernisasi terhadap peralatan tangkap baru menimbulkan reaksi sosial masyarakat terutama nelayan tradisional dan menimbulkan konflik antar sesama nelayan. Pada tahun 1974 di Muncar terjadi kerusuhan besar-besaran, para nelayan setempat

⁸ *Ibid*, hlm. 75.

⁹ Edi Susilo, *Dinamika Struktur Sosial Dalam Ekosistem Pesisir*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2010), hlm. 6.

¹⁰ Kusnadi, *Nelayan: Strategi Jaringan Adaptasi dan Jaringan Sosial*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 2000), hlm. 11.

¹¹ *Ibid*, hlm. 11.

melakukan pembakaran perahu *slerek*¹² yang menjadi titik awal dimulainya kegiatan modernisasi perikanan di daerah Muncar.¹³ Kerusakan tersebut selain karena menolak adanya peralatan tangkap baru, disisi lain nelayan tradisional tetap ingin mempertahankan peralatan tangkap tradisionalnya.¹⁴

Kemampuan sebagian kecil nelayan dalam menggunakan sumberdaya yang tersedia ini mendorong terjadinya ketimpangan pemilikan alat-alat produksi dan tingkat kecanggihannya. Faktor tersebut membawa pengaruh terhadap perolehan pendapatan di kalangan nelayan.¹⁵ Selain menyebabkan ketimpangan-ketimpangan juga menimbulkan proses marginalisasi nelayan tradisional dan nelayan modern sehingga mendorong timbulnya situasi *overfishing* di sejumlah kawasan perairan.¹⁶

Pada tahun 1980-an permasalahan tentang kerusakan lingkungan pesisir dan laut yang berimplikasi luas terhadap kehidupan masyarakat nelayan dirasakan mulai mengganggu. Sebagai reaksi dan kritik dari berbagai pihak terhadap operasi peralatan tangkap *trawl* yang dianggap merusak lingkungan dan menimbulkan kemiskinan nelayan. Kemudian pemerintah mengeluarkan Keppres No.39 tahun 1980 yang

¹² Menurut nelayan setempat perahu *slerek* merupakan perahu khas nelayan Muncar.

¹³ Kusnadi, *Akar Kemiskinan Nelayan*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm.20.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak H. Hasan Basri Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Banyuwangi tanggal 17 Oktober 2020, di Jl. Kalimoro, Dusun Muncar, Tembokrejo, Kec Muncar.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 182.

¹⁶ Bagong Suyanto, dkk, *Kajian Model Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Desa Pantai Madura dan Kawasan Selatan Jawa Timur*, (Surabaya: Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Jawa Timur, 2003), hlm. 5.

melarang operasi peralatan tangkap tersebut di wilayah Indonesia Barat.¹⁷ Alat penangkapan dengan *trawl* merupakan salah satu alat penangkapan ikan yang dilarang penggunaannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, hal ini disebabkan karena alat tangkap tersebut dapat menyebabkan kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungan perairan.¹⁸ Awal kemunculan peralatan tangkap menggunakan *trawl* para nelayan Muncar sudah menolak dan sejak awal kemunculannya tidak berani memasuki kawasan Muncar, karena para nelayan memang tidak mau menggunakannya. Selain itu, faktor-faktor alam ikut pula menghalangi kehadiran *trawl* sendiri. Seperti laut yang berbatu-batu karang dan arus yang keras berkat sifat pembawaan Laut Selatan.¹⁹

Setelah munculnya polemik tentang permasalahan penangkapan menggunakan *trawl* dan munculnya alat tangkap jaring *purse seine*, perairan di Muncar yang terkenal sebagai daerah sentra pendaratan nelayan dan ikan pada tahun 1984 sangat disayangkan pada musim panen, karena harga ikan turun drastis para nelayan tidak mendapatkan keuntungan dari hasil tangkapan. Sementara itu, pabrik-pabrik pengalengan ikan bahkan sampai mendatangkan ikan dari Negara Jepang untuk memenuhi kebutuhan pabriknya.²⁰ Menurunnya harga ikan serta mengakibatkan

¹⁷ Kusnadi, *Akar Kemiskinan Nelayan*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 24.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 24.

¹⁹ *Sketmasa*, edisi 1-15 Nopember 1980, hlm. 25.

²⁰ *Surabaya Post*, 4 Januari 1984.

pabrik-pabrik pengalengan membeli ikan dari luar membuat Pemda Banyuwangi mengeluarkan SK Bupati Banyuwangi nomor 433 tanggal 16 Januari 1987 tentang harga pembelian ikan oleh pabrik.²¹

Selanjutnya mengenai upaya-upaya nelayan dan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan menghadapi krisis ekonomi serta mendorong para nelayan untuk meningkatkan hasil produktivitas ikan tangkapannya, pada 17 Mei 1977 Gubernur Jawa Timur meresmikan penerapan sistem pelelangan ikan untuk seluruh Jawa Timur. Selanjutnya pada tahun 1992 nelayan Muncar mengupayakan harga wajar ikan bukan harga dasar. Dan upaya lainnya yaitu dengan membangun pelabuhan ikan Muncar. Pembangunan dimulai pada tahun 1991 dan diharapkan bisa meningkatkan hasil penangkapan ikan para nelayan.²² Dari pemaparan latar belakang di atas maka penulis membahas tentang “Penerapan Kebijakan Revolusi dan Pengaruhnya terhadap Ekonomi Masyarakat Nelayan Muncar Banyuwangi 1974-1999”. Penulisan ini dimulai dari bagaimana penerapan tentang kebijakan Revolusi Biru. Penulis juga menjelaskan pengaruh kebijakan tersebut serta upaya-upaya masyarakat dan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan utama yang dibahas pada penelitian ini yakni mengenai “Penerapan Kebijakan Revolusi Biru dan Pengaruhnya terhadap Ekonomi Masyarakat Nelayan

²¹ *Surabaya Post*, 14 Oktober 1987, hlm. 6.

²² *Surya*, 22 Maret 1992.

Muncar Banyuwangi Tahun 1974-1999". Faktor utama adanya kebijakan tersebut adalah modernisasi perikanan terutama dibidang peralatan tangkap dari cara tradisional ke cara yang lebih modern. Hal tersebut berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat nelayan setempat.

Berdasarkan pembahasan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, agar penulisan bisa disusun dengan rapi, maka akan dibagi lagi menjadi beberapa permasalahan yang perlu dibahas. Permasalahan tersebut dituangkan dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Revolusi Biru terhadap masyarakat nelayan Muncar Banyuwangi 1974-1999?
2. Bagaimana Pengaruh Revolusi Biru terhadap ekonomi Masyarakat Nelayan Muncar Banyuwangi 1974-1999?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis korelasi antara Penerapan Kebijakan Revolusi Biru dan Pengaruhnya terhadap Ekonomi Masyarakat Nelayan Muncar Banyuwangi 1974-1999. Masyarakat nelayan memiliki karakteristik sosial ekonomi yang berbeda dengan masyarakat industri atau masyarakat lainnya. Perbedaan tersebut disebabkan oleh keterkaitan yang erat terhadap karakteristik ekonomi, ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi, sosial maupun budaya.²³

²³ Hikmah, *Gender Dalam Rumah Tangga Masyarakat Nelayan*, (Jakarta: Badan Riset Kelautan dan Perikanan, 2008), hlm. 1.

Pembahasan dalam penelitian ini mengambil sudut pandang sosial ekonomi sebagai aspek penting yang perlu dibahas.

Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan: Pertama, untuk memenuhi tugas akhir studi. Secara metodologis, penelitian ini terdapat di lingkup sejarah sosial ekonomi karena membahas sosial ekonomi dalam kehidupan masyarakat nelayan Muncar, maka penelitian ini memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan kehidupan sosial ekonomi masyarakat nelayan.

Kedua, menjelaskan mengenai bagaimana penerapan kebijakan modernisasi perikanan terhadap masyarakat nelayan Muncar. Ketiga, menjelaskan pengaruh kebijakan modernisasi terhadap ekonomi masyarakat nelayan selama periode tersebut. Keempat, penelitian ini menjelaskan mengenai upaya-upaya masyarakat nelayan Muncar dan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan.

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan sejarah mengenai sebelum dan sesudah diterapkannya program kebijakan dari pemerintah tentang modernisasi perikanan atau Revolusi Biru. Di mana kebijakan ini banyak menimbulkan ketimpangan-ketimpangan antara nelayan tradisional dan nelayan modern sehingga dapat mempengaruhi langsung terhadap perekonomian masyarakat nelayan Muncar. Selanjutnya menambah wawasan bagi khalayak umum mengenai aktivitas yang dilakukan masyarakat nelayan ini, mengingat dari banyaknya kejadian pasang surut yang dialami oleh nelayan setempat.

1.4 Batasan dan Ruang Lingkup Bahasan

Sebagaimana penelitian dan penulisan sejarah pada umumnya, dalam merekonstruksi sejarah diperlukan batasan-batasan topik untuk memperjelas pemahaman. Batasan-batasan yang dimaksud adalah ruang lingkup spasial dan ruang lingkup temporal yang nantinya akan menjadi acuan dalam melakukan penulisan.

Ruang lingkup spasial yang diambil pada penelitian ini adalah masyarakat nelayan Muncar di Banyuwangi. Kemudian pemilihan daerah Muncar sebagai objek penelitian berdasarkan pada beberapa hal antara lain, daerah Muncar memiliki potensi ikan yang cukup besar dan merupakan penghasil ikan terbesar di Kabupaten Banyuwangi. Mayoritas penduduknya adalah nelayan karena pantainya yang berbatasan langsung dengan Selat Bali di bagian timur.

Ruang lingkup temporal dalam penelitian ini di mulai pada tahun 1974 sampai dengan 1999. Tahun 1970 menjadi batasan awal dikarenakan pada tahun tersebut dilaksanakan kebijakan nasional oleh pemerintah tentang motorisasi perahu dan modernisasi peralatan tangkap, kebijakan ini dikenal dengan istilah Revolusi Biru (*blue revolution*).²⁴ Kebijakan modernisasi perikanan tersebut telah mengundang reaksi sosial masyarakat nelayan, khususnya nelayan-nelayan tradisional. Mereka khawatir modernisasi perikanan tersebut akan semakin menyingkirkan mereka dari kegiatan penangkapan. Seperti yang terjadi di Muncar pada tahun 1974 nelayan-nelayan setempat melakukan pembakaran perahu-perahu *slerek* yang menjadi titik

²⁴ Kusnadi, *Akar Kemiskinan Nelayan*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm.20.

awal di mulainya kegiatan modernisasi perikanan di daerah Muncar.²⁵ Diperkirakan sebanyak 2000 nelayan telah mengadakan pengrusakan terhadap alat-alat penangkapan milik masyarakat setempat secara beramai-ramai.²⁶ Peristiwa di Muncar tersebut disebabkan karena sebagian nelayan tradisional ingin tetap mempertahankan peralatan tangkap tradisionalnya.²⁷

Batasan penelitian ini diakhiri pada tahun 1999 dikarenakan pada tahun tersebut merupakan awal di mulainya Otonomi Daerah yang berimplikasi terhadap kebijakan sektor perikanan laut. untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat nelayan pemerintah menerapkan kebijakan modernisasi serta menetapkan kebijakan otonomi daerah No. 22 tahun 1999 tentang pengelolaan sumber daya alam yang dikelola pemerintah daerah sesuai potensi yang dimiliki setiap daerah.²⁸ Selain itu, karena terjadi krisis moneter yang menyebabkan perekonomian masyarakat mengalami penurunan tak terkecuali perekonomian masyarakat pesisir. Oleh karena itu pada awal tahun 2000 Departemen Kelautan dan Perikanan membuat program secara serentak yang langsung menyentuh masyarakat pesisir, yaitu Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP).

²⁵ *Ibid*, hlm. 76.

²⁶ *Kompas*, Kamis 3 Oktober 1974.

²⁷ Wawancara dengan Bapak H. Hasan Basri Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Banyuwangi tanggal 17 Oktober 2020, di Jl. Kalimoro, Dusun Muncar, Tembokrejo, Kec Muncar.

²⁸ <https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/produk-hukum-peraturan-perundangan/undang-undang/uu-no22-tahun-1999-tentang-pemerintahan-daerah/> diakses pada 16 Januari 2020, pukul 14.40.

1.5 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penulisan ini bertujuan sebagai bahan pembanding atau pembeda dari penelitian sebelumnya. Penulis termotivasi untuk menulis tentang Penerapan kebijakan Revolusi Biru dan pengaruhnya terhadap ekonomi masyarakat nelayan Muncar Banyuwangi, sebab penelitian-penelitian sebelumnya yang menulis fokus kajian tentang masyarakat nelayan Muncar mencakup spasial, temporal dan kajian yang berbeda-beda.

Beberapa referensi yang dapat digunakan sebagai pembanding dalam penelitian ini di antaranya adalah buku yang berjudul *Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan*, Karya dari Drs. Kusnadi, M.A.²⁹ buku ini menjelaskan tentang kehidupan masyarakat pesisir dan kemiskinan yang dialami masyarakat pesisir. Selain itu, buku ini juga banyak menjelaskan munculnya konflik sosial dan faktor-faktor yang menimbulkan konflik antar masyarakat nelayan. Buku ini bagi penulis dijadikan sebagai referensi dilihat dari adanya permasalahan yang terjadi dalam masyarakat nelayan yang menyinggung konflik antar masyarakat nelayan di mana dalam penelitian ini juga dibahas mengenai konflik yang terjadi antara nelayan-nelayan tradisional setelah diberlakukannya modernisasi alat tangkap.

²⁹ Kusnadi, *Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan*, (Yogyakarta: LKis, 2002).

Karya lain milik Kusnadi yang berjudul *Nelayan: Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial*.³⁰ Buku ini menjelaskan tentang kehidupan nelayan di mulai dari struktur sosial hingga karakteristik perekonomian masyarakat nelayan. Kemudian juga menjelaskan bagaimana cara nelayan dalam mempertahankan perekonomian ketika menghadapi masalah atau keadaan buruk seperti perubahan sosial yang terjadi. Buku ini bermanfaat bagi penulis dan bisa dijadikan acuan karena di dalamnya juga menjelaskan jaringan-jaringan sosial antar masyarakat nelayan yang diakibatkan diberlakukannya kebijakan oleh pemerintahan.

Buku yang berjudul *Ekonomi Kelautan*, karya Mulyadi S.³¹ buku ini menjelaskan kondisi ekonomi masyarakat nelayan yang berkaitan dengan perilaku ekonomi masyarakat nelayan dan pembangunan wilayah pesisir dan lautan. Kemudian pola adaptasi masyarakat nelayan menyesuaikan dengan ekosistem lingkungan fisik laut dan lingkungan sosial di sekitarnya. Penulis menggunakan buku ini karena menjelaskan kondisi ekonomi di sekitar pesisir dan perilaku masyarakat pesisir, serta dapat digunakan sebagai tambahan wawasan dan pengantar mengenai perekonomian yang terjadi di wilayah pesisir.

³⁰ Kusnadi, *Nelayan: Strategi Jaringan Adaptasi dan Jaringan Sosial*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 2000).

³¹ Mulyadi S, *Ekonomi Kelautan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

Buku karya Edi Susilo yang berjudul *Dinamika Struktur Sosial Dalam Ekosistem Pesisir*.³² Buku ini merupakan disertasi yang semula berjudul “*Dinamika Struktur dalam Ekosistem Pesisir: Kapasitas Ruang dan Titik Kritis Struktur Sosial Masyarakat Nelayan di Dusun Karanggongso Kabupaten Trenggalek Jawa Timur (1950-2008)*”. Menjelaskan tentang adanya interaksi sosial yang membentuk struktur sosial kelompok dalam masyarakat nelayan sehingga mengakibatkan perubahan-perubahan yang dikenal dengan istilah proses sosial dalam masyarakat. Buku ini lebih ditekankan penyebab utama terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat pesisir serta upaya pembangunan sebagai langkah untuk meningkatkan kapasitas ruang struktur sosial.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Bagong Suyanto yang berjudul *Kajian Model Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Desa Pantai Madura dan Kawasan Selatan Jawa Timur*.³³ Penelitian ini membahas bagaimana memecahkan atau permasalahan yang sedang dialami masyarakat pantai yaitu mengenai kemiskinan serta mengkaji berbagai program untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di kalangan masyarakat pantai dengan berupaya melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat pantai di Pulau Madura dan Kawasan Selatan Jawa Timur. Penelitian ini walaupun

³² Edi Susilo, *Dinamika Struktur Sosial Dalam Ekosistem Pesisir*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2010).

³³ Bagong Suyanto, dkk, *Kajian Model Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Desa Pantai Madura dan Kawasan Selatan Jawa Timur*, (Surabaya: Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Jawa Timur, 2003).

berbeda spasial tetapi bagi penulis bisa dijadikan sebagai referensi tambahan karena di dalamnya membahas pemberdayaan perekonomian di desa-desa pantai.

Selain menggunakan buku-buku di atas, penulis juga menggunakan Skripsi, yaitu Skripsi karya Ros Dana Citra Melati yang berjudul *Dinamika Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Surabaya di Pesisir Kenjeran Tahun 1972-1998*.³⁴ Skripsi ini menjelaskan kehidupan sosial ekonomi nelayan Surabaya yang mengalami dinamika semenjak pemerintah melakukan modernisasi. Di jelaskan pula awal terbentuknya desa-desa di pesisir Kenjeran, penerapan dan implikasi program modernisasi dalam kehidupan masyarakat nelayan Kenjeran. Masuknya modernisasi dalam kehidupan masyarakat nelayan Kenjeran di mulai pada tahun 1972 dan ditandai dengan pembangunan infrastruktur. Modernisasi tersebut mengalami kegagalan dan memberikan dampak buruk bagi nelayan Kenjeran. Kemudian industrialisasi dalam kehidupan masyarakat nelayan Kenjeran dipengaruhi oleh kemunculan industri pariwisata di wilayah tersebut. Skripsi ini bermanfaat bagi penulis untuk mengetahui bagaimana kebijakan modernisasi diterapkan diwilayah tersebut yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat nelayan.

1.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka kerja yang mencakup konsep yang digunakan dalam membuat analisis dalam sebuah penelitian. Penelitian ini membahas

³⁴ Ros Dana Citra Melati, *Dinamika Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Surabaya di Pesisir Kenjeran Tahun 1972-1998*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2019).

mengenai kebijakan atau modernisasi yang di terapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberadaan suatu masyarakat desa pantai atau pesisir. Istilah modernisasi sendiri adalah suatu bentuk perubahan sosial yang terarah dan didasarkan pada perencanaan serta kemajuan masyarakat dan bangsa dengan ciri-ciri yang mendasar adalah bahwa modernisasi adalah suatu bentuk revolusioner, rumit, sistematis, jangka panjang, bertahap dan bergerak kedepan.³⁵ Modernisasi dalam bidang perikanan di wujudkan dengan program motorisasi dan perubahan alat tangkap yang semakin canggih.

Adanya kebijakan modernisasi sesungguhnya bukan hanya mencakup arti penting pengelolaan sumberdaya perikanan yang berorientasi pada kesinambungan sumberdaya laut. Tetapi juga menyangkut pada persoalan bagaimana upaya pemberdayaan masyarakat desa pesisir yang dilakukan dapat menjamin para pelaku ekonomi rakyat memperoleh apa yang seharusnya menjadi hak mereka, khususnya kesejahteraan dan taraf kehidupan yang layak.³⁶ Oleh karena itu, pemerintah memberlakukan pembangunan masyarakat pesisir mengenai kebijakan motorisasi dan modernisasi peralatan tangkap pada awal tahun 1970 yang dikenal dengan istilah Revolusi Biru.

³⁵ Syahrial Syarbani dan Rusdiyanta, *Dasar-dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 149.

³⁶ Bagong Suyanto, dkk, *Kajian Model Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Desa Pantai Madura dan Kawasan Selatan Jawa Timur*, (Surabaya: Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Jawa Timur, 2003), hlm. v.

Secara umum pengertian Revolusi Biru adalah perubahan mendasar cara berfikir dari daratan ke maritim dengan konsep berkelanjutan untuk peningkatan produksi kelautan. Revolusi Biru mempunyai empat pilar, yaitu perubahan cara berfikir dan orientasi pembangunan dari daratan ke maritim, pembangunan berkelanjutan, peningkatan produksi perikanan, dan peningkatan pendapatan rakyat yang adil, merata, dan pantas.³⁷ Istilah Revolusi Biru (modernisasi perikanan) merupakan turunan dari Revolusi Hijau pada sektor perikanan yang awal mulanya di lakukan melalui produksi teknologi baru dalam kegiatan perikanan (modernisasi dan inovasi alat tangkap). Sejak saat itu kebijakan dan program modernisasi perikanan, seperti motorisasi, Gerbang Mina Bahari (Gerakan Pembangunan Nasional Kelautan dan Perikanan), PROPEKAN (Program Peningkatan Ekspor Hasil Perikanan Budidaya) dan PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir).³⁸

Modernisasi di pahami sebagai momentum perubahan sosial masyarakat nelayan ketika pemerintah mengeluarkan paket kebijakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perikanan laut yaitu: modernisasi melalui penggunaan motorisasi dan teknologi alat tangkap yang modern, kebijakan pemberian fasilitas kredit usaha, mesin-mesin, perahu, pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung kegiatan perikanan laut agar menjamin efektifitas dan peningkatan

³⁷ Indriani Laloma, *Senra Produksi Perikanan di Salibabu (Penerapan Revolusi Biru Dalam Arsitektur)*, (Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2014), hlm. 116-117.

³⁸ I Wayan Tagel Eddy, *Revolusi Biru dan Human Security Nelayan Di Kusamba Klungkung*, (Bali: Universitas Udayana, 2019), Vol. XIX. No. 1, hlm. 53.

produksi berupa pelabuhan perikanan, ruang pendingin, tempat pengeringan ikan dan tempat pelelangan ikan (TPI).³⁹

Pada tahun 1980-1996 pemerintah memperbarui kebijakan modernisasi perikanan dengan diluncurkannya deregulasi perikanan yang mencakup pengembangan alat tangkap, pembangunan pelabuhan dan penambahan armada penangkapan ikan melalui kemampuan produksi dalam negeri maupun impor kapal bekas.⁴⁰ Pemerintah juga menerbitkan regulasi terkait dengan modernisasi perikanan, yaitu melalui program penyaluran kredit usaha kepada nelayan dan bantuan subsidi bahan bakar minyak (BBM), Keputusan Menteri Pertanian No. 607.Kpts./Um/9/1976 tentang pembagian wilayah penangkapan berdasarkan tingkat kualifikasi peralatan tangkap yang dimiliki oleh nelayan, Keppres No. 39 Tahun 1980 tentang penghapusan operasi penggunaan *trawl* (pukat harimau), Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta lahirnya Keppres No 10 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro Rakyat untuk menyejahterakan nelayan.⁴¹

Masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas yang

³⁹ Muiarni, *Revolusi Biru Perikanan dan Perubahan Sosial Ekonomi Nelayan Desa Makoro Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi*, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2016), hlm. 55.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 55.

⁴¹ Prihandoko, dkk, *Kondisi Sosial Ekonomi Nelayan Artisanal di Pantai Utara Provinsi Jawa Barat*, (Bogor: Institut Pertanian Bogor, Maret 2012 Vol. 8 No. 1), hlm. 84.

terkait dengan ketergantungan pada pemanfaatan sumberdaya pesisir. Tentu masyarakat pesisir tidak hanya nelayan, melainkan juga pembudidaya ikan, pengolah ikan dan pedagang ikan. Namun secara empiris di kalangan masyarakat pesisir itu sendiri pelaku utama ekonomi lebih ditekankan langsung kepada masyarakat nelayan yang kehidupan sehari-harinya menggantungkan dari hasil tangkapan ikan di laut.⁴² Namun, nelayan tidak hanya melaut mencari ikan akan tetapi berusaha mengelola hasil produksi dan memasarkannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk mengatasi kesulitan modal, masyarakat nelayan mengembangkan suatu mekanisme sendiri yaitu sistem modal bersama. Sistem ini memungkinkan terjadinya kerja sama diantara nelayan dalam penggandaan modal juga menunjukkan terjadinya pemerataan risiko karena kerugian besar yang dapat terjadi setiap saat, seperti perahu hilang atau rusaknya alat tangkap akan menjadi tanggungan bersama.⁴³

Nelayan adalah mereka yang mata pencaharian pokoknya di bidang penangkapan ikan dan penjualan ikan yang hidup di daerah pantai. Secara geografis, masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut.⁴⁴ Keadaan masyarakat nelayan di Muncar sendiri di mana sebelum adanya kebijakan modernisasi nelayan

⁴² Arif Satria, *Pesisir dan Laut Untuk Rakyat*, (Bogor: IPB Press, 2009), hlm. 30.

⁴³ Mulyadi, *Ekonomi Kelautan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 15.

⁴⁴ Kusnadi, *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*, (Yogyakarta: Kerjasama Pusat Penelitian Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Lembaga Penelitian Univeritas Jember), hlm. 27.

masih menggunakan alat tangkap ikan dengan cara tradisional. Seperti pada tahun 1960-an mekanisasi perahu mulai dilakukan dengan menambahkan motor pada perahu layar, yang selanjutnya berkembang menjadi perahu motor.⁴⁵ Namun setelah diberlakukannya kebijakan Revolusi Biru atau modernisasi alat tangkap masyarakat nelayan Muncar mulai mengalami pasang surut dari segi pendapatan ekonomi nelayan.

Secara rinci penelitian ini membahas mengenai kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah yaitu mengenai modernisasi alat tangkap yang disertai dengan pembangunan fasilitas KUD mina dan Tempat Pelelangan Ikan. Selanjutnya dijelaskan mengenai pengaruh kebijakan modernisasi terhadap ekonomi nelayan yang mengalami pasang surut. Penelitian ini termasuk dalam kategori sejarah sosial ekonomi karena berisi penjelasan mengenai kehidupan sosial dan ekonomi yang mengalami perubahan akibat perubahan dua aspek tersebut. Tulisan ini tergolong dalam sejarah sosial karena menggunakan masyarakat sebagai bahan kajian, maka beberapa ilmu bantu yang akan digunakan selama penelitian adalah ilmu-ilmu sosial. Dengan ilmu-ilmu sosial, sejarawan memiliki kemampuan menerangkan yang lebih jelas, sekalipun kadang-kadang harus terikat pada modal teoritisnya. Seperti yang dikatakan Hobsbawm, setiap penulisan sejarah sosial memerlukan sebuah model yang sekalipun tidak sangat formal dan terperinci strukturnya, setidaknya sebagai

⁴⁵ Masyhuri, *Menyisir Pantai Utara: Usaha Perekonomian Nelayan di Jawa dan Madura 1850-1940*, (Yogyakarta: Pustaka Nusantara dan Perwakilan KITLV, 1996), hlm. 6.

sebuah kerangka akan tampak lingkaran pusat atau lingkaran hubungan dari permasalahan yang akan dikerjakan.⁴⁶

Menurut Douglas C. North, masalah besar sejarah ekonomi menitikberatkan pada dua hal. Pertama, pertumbuhan ekonomi sepanjang waktu dan faktor yang menentukan pertumbuhan tersebut. Kedua, distribusi pendapatan ekonomi bagi arah pertumbuhannya. Fokus perhatian selanjutnya meliputi seluruh bidang yang berhubungan dengan masalah kemakmuran dan berbagai kelompok masyarakat selama terjadinya perubahan ekonomi. Kegiatan ekonomi dapat pula dikaji memperhitungkan aspek sosial yang melingkupi, sehingga akan menjadi kajian yang lazim disebut dengan sejarah sosial-ekonomi.⁴⁷

1.7 Metode Penelitian

Di dalam sebuah penelitian pastinya sangat di perlukan sebuah metode guna menemukan titik terang dari permasalahan yang akan di teliti, apalagi dalam penelitian dan penulisan sejarah. Penelitian yang berjudul “Penerapan Kebijakan Revolusi Biru dan Pengaruhnya terhadap Ekonomi Masyarakat Nelayan Muncar Banyuwangi Tahun 1974-1999” ini menggunakan metode penelitian sejarah. Tahap-tahap dalam penelitian sejarah, antara lain: pemilihan topik, pengumpulan sumber

⁴⁶ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), hlm.42 dalam Skripsi Ros Dana Citra Melati, *Dinamika Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Surabaya di Pesisir Kenjeran Tahun 1972-1998*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2019), hlm. 20.

⁴⁷ Douglas C. North, *Sejarah Ekonomi* dalam buku Tufik Abdullah, *Ilmu Sejarah dan Historiografi, Arah dan Perspektif* (Jakarta:Gramedia,1985), hlm.171.

atau heuristik, verifikasi (kritik sejarah dan keabsahan sumber), interpretasi (analisis dan sintesis) dan penulisan sejarah atau historiografi.⁴⁸

Di dalam sebuah penelitian pastinya sangat di perlukan sebuah metode guna menemukan titik terang dari permasalahan yang akan di teliti, apalagi dalam penelitian dan penulisan sejarah. Penelitian yang berjudul “Penerapan Kebijakan Revolusi Biru dan Pengaruhnya terhadap Ekonomi Masyarakat Nelayan Muncar Banyuwangi Tahun 1974-1999” ini menggunakan metode penelitian sejarah. Tahap-tahap dalam penelitian sejarah, antara lain: pemilihan topik, pengumpulan sumber atau heuristik, verifikasi (kritik sejarah dan keabsahan sumber), interpretasi (analisis dan sintesis) dan penulisan sejarah atau historiografi.⁴⁹

Pertama, Pemilihan topik yang sebaiknya dipilih berdasarkan kedekatan emosional, kedekatan intelektual dan rencana penelitian.⁵⁰ Dalam tahap ini, penulis menggunakan kedekatan emosional artinya topik tentang penerapan Kebijakan Revolusi Biru dan pengaruhnya terhadap Ekonomi Masyarakat Nelayan Muncar ditentukan karena penulis ingin menulis sejarah wilayah tempat tinggalnya yang belum pernah ditulis oleh peneliti lainnya.

Kedua, Pengumpulan sumber atau Heuristik, yaitu proses pengumpulan data, baik primer maupun sekunder, berupa dokumen-dokumen tertulis maupun lisan dari

⁴⁸Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana, 1995), hlm.69.

⁴⁹ *Ibid*, hlm.69.

⁵⁰ *Ibid*, hlm.70.

peristiwa masa lampau sebagai sumber sejarah. Sumber primer yang diperoleh adalah arsip tentang Perda Jawa Timur yang berisi tentang peraturan-peraturan izin penggunaan alat tangkap nelayan dan pengangkutan ikan, foto-foto lama dari Departemen Penerangan Provinsi Jawa Timur, data-data kependudukan dan data-data yang berhubungan dengan nelayan yang melalui penelusuran terhadap dokumen yang tersimpan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur (Jalan Jagir Wonokromo) dan (Jalan Menur Pumpungan), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, Perpustakaan Nasional RI, Badan Pusat Statistik Banyuwangi, UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Muncar, Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Surabaya, Perpustakaan Medayu Agung.

Selain data-data tertulis, penulis juga menggunakan sumber lisan yang hasilnya didapat melalui wawancara dengan narasumber. Sumber lisan yang digunakan penulis didapat dari tokoh masyarakat yang merupakan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Dewan Pimpinan Cabang Banyuwangi yang dulu juga merupakan nelayan pada tahun 1980-an serta beberapa narasumber pelaku sejarah sezaman yang tinggal di sekitar pantai Muncar yang merupakan nelayan hingga sekarang. Selama tahap pengumpulan sumber, penulis juga berhasil menemukan koran-koran dan majalah lama mengenai nelayan Muncar yang dapat digunakan sebagai tambahan sumber penulisan skripsi. Selain itu, penulis juga memanfaatkan

teknologi dengan mengakses beberapa surat kabar yang menyediakan arsipnya secara online yaitu surat kabar Kompas.

Ketiga, verifikasi atau kritik sumber dilakukan dengan pengujian terhadap aspek isi dari sumber mengacu pada materi sumber yang sezaman. Kritik sumber dibagi atas dua macam, yaitu kritik internal dan kritik eksternal. Kritik internal adalah kritik atas isi sumber dengan memperhatikan kesesuaian isi yang tercantum pada sumber tersebut. Sedangkan kritik eksternal adalah kritik atas keaslian sumber dengan memperhatikan relevansi tahun pembuatan, bahan yang digunakan serta aspek lain yang berkenaan dengan fisik sumber tersebut.

Keempat, Interpretasi dalam tahap interpretasi penulis melakukan analisis dengan cara menghubungkan sumber-sumber yang telah didapat agar ditemukan satu-kesatuan yang berhubungan. Perlu dilakukan penafsiran secara logis terhadap keseluruhan konteks peristiwa sehingga dapat disusun menjadi satu kesatuan yang masuk akal.

Kelima, Penulisan (Historiografi). Tahapan ini yang harus dilakukan sejarawan setelah melakukan heuristik, verifikasi dan interpretasi. Sebuah penelitian yang dikaji dituangkan dalam bentuk tulisan agar dapat dibaca khalayak luas. Penyajian hasil penelitian ini paling tidak biasanya terdiri dari tiga bagian yaitu pengantar, hasil penelitian, dan ditutup dengan kesimpulan.⁵¹

⁵¹ *Ibid*, hlm. 80.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk membentuk suatu kerangka pemikiran yang sistematis guna untuk mempermudah dalam proses penulisan sesuai urutan peristiwa dan periodisasi. Pada sistematika penulisan ini juga berfungsi mengontrol tulisan bagi penulis dan membantu pembaca memahami maksud serta alur penulisan kajian ini. Agar didapatkan gambaran sejarah yang terstruktur, maka rencana sistematika yang digunakan dalam penelitian tentang “Penerapan Kebijakan Revolusi Biru dan Pengaruhnya terhadap Ekonomi Masyarakat Nelayan Muncar Banyuwangi Tahun 1974-1999” akan diatur sesuai urutan waktu dan kronologis. Berdasarkan pemikiran di atas maka sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I berisi mengenai Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, batasan dan ruang lingkup, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metode dan sumber penelitian, dan sistematika penulisan. Di dalam sistematika penulisan menggambarkan secara umum mengenai isi dari beberapa bab dalam penelitian ini, yang kemudian menjadi acuan penulisan untuk mengembangkan ide-ide pada bab-bab selanjutnya.

BAB II berisi tentang pesisir Muncar beserta gambaran masyarakatnya. Gambaran tersebut meliputi, kondisi geografis, keadaan penduduk dan karakteristik budaya masyarakat nelayan seperti adat istiadat dan organisasi nelayan Muncar Banyuwangi.

BAB III berisi mengenai bagaimana kebijakan Revolusi biru di terapkan di masyarakat nelayan Muncar, kemudian Pengaruh kebijakan Revolusi biru terhadap ekonomi masyarakat nelayan serta upaya-upaya masyarakat nelayan dan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan Muncar.

BAB IV berisi simpulan dari hasil penelitian ini, sekaligus menjawab keseluruhan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas.